



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B- 197 /01-30/01/2013 23 Januari 2013  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Nota Kesepakatan dan Rencana Aksi Bersama

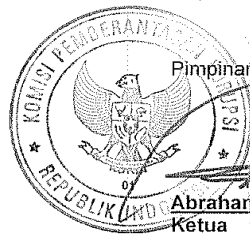
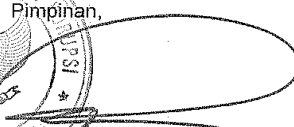
**Kepada Yth.  
Presiden Republik Indonesia**

Menindaklanjuti hasil kajian KPK terhadap Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan di Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan pada tahun 2010, dan menimbang banyaknya permasalahan-permasalahan mendasar terkait perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan diantaranya adalah 1. Disharmonisasi kebijakan dan regulasi antar sektor; 2. Pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan yang belum optimal; dan 3. Belum adanya mekanisme penyelesaian konflik kawasan hutan yang memberikan keadilan bagi seluruh pihak, maka KPK menginisiasi terbangunnya komitmen bersama antar Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan pengukuhan kawasan hutan.

Penyelesaian permasalahan tersebut bersifat terintegrasi dan perlu mendapat dukungan dan sinergi dari seluruh elemen Kementerian/Lembaga, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, sebagai terobosan upaya pencegahan korupsi *trigger mechanism*, KPK menyampaikan draft Nota Kesepakatan Bersama PERCEPATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN INDONESIA, yang telah melalui proses pembahasan dan telah disepakati oleh Kementerian/Lembaga terkait untuk perbaikan tata kelola Kehutanan di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana permohonan kami kepada Bapak dalam audiensi beberapa waktu yang lalu, mohon perkenan Bapak untuk mengundang Pimpinan Kementerian/Lembaga tersebut diatas di Istana Negara dalam acara pengukuhan komitmen bersama dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dihadapan Bapak. Jika dimungkinkan, mohon dapat diselenggarakan dalam waktu Bulan Januari atau Bulan Februari 2013.

Demikian permohonan disampaikan, dan atas kesediaan Bapak Presiden diucapkan terima kasih.

  
Pimpinan,  
  
**Abraham Samad**  
Ketua

Tembusan:

1. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Sekretaris Negara
3. Yth. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

## NOTA KESEPAKATAN RENCANA AKSI BERSAMA

### ANTARA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN KEHUTANAN  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Nomor :

### TENTANG

#### PERCEPATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN INDONESIA

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu tiga belas (.../.../2013), bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Gamawan Fauzi**: Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Amir Syamsudin**, Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **Agus D.W. Martowardojo**: Menteri Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

4. **Jero Wacik:** Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan No.18 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.
5. **Suswono:** Menteri Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Harsono RM. No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA**.
6. **Zulkifli Hasan:** Menteri Kehutanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEENAM**.
7. **Djoko Kirmanto:** Menteri Pekerjaan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETUJUH**.
8. **Balthasar Kambuaya:** Menteri Lingkungan Hidup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDELAPAN**.
9. **Armida S. Alisjahbana:** Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESEMBILAN**.
10. **Hendarman Supandji:** Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 2, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESEPULUH**.
11. **Asep Karsidi:** Kepala Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Raya Jakarta - Bogor KM. 46 Cibinong, Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESEBELAS**.

12. **Otto Nur Abdullah:** Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Latuharhary No. 4B, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUABELAS**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS DAN PIHAK KEDUABELAS** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan mengadakan **NOTA KESEPAKATAN RENCANA AKSI BERSAMA** tentang **PERCEPATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN INDONESIA**, selanjutnya di sebut sebagai **NOTA KESEPAKATAN**, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

#### **PASAL 1**

##### **TUJUAN**

**NOTA KESEPAKATAN** ini bertujuan:

- a. meningkatkan kerjasama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia;
- b. meningkatkan kerjasama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam mendorong percepatan pembangunan nasional dan pencegahan korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 2**

##### **RUANG LINGKUP**

- (1) **PARA PIHAK** berkomitmen untuk bekerjasama dalam perencanaan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta monitoring dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan **PARA PIHAK** untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia.
- (2) Percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) agenda utama, yaitu:
  - a. harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyesuaian teknis dan prosedur; dan
  - c. resolusi konflik didasari pada prinsip keadilan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Agenda utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana aksi.

**PASAL 3**  
**TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** bertindak dan bertanggung-jawab atas dasar tugas pokok dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan **NOTA KESEPAKATAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta kegiatan pendukung lainnya.

**PASAL 4**  
**SATUAN TUGAS**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat membentuk satuan tugas bersama beranggotakan wakil **PARA PIHAK** yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melaksanakan **NOTA KESEPAKATAN**.
- (2) Satuan tugas bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAKATAN**.
- (3) Tugas, fungsi dan susunan organisasi satuan tugas bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (4) Dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan secara bersama-sama melaksanakan fungsi koordinasi dan supervisi.

**PASAL 5**  
**DATA DAN INFORMASI**

**PARA PIHAK** memberikan data dan informasi dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAKATAN**.

**PASAL 6**  
**PENDANAAN**

- (1) Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan **NOTA KESEPAKATAN** ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 7**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan **NOTA KESEPAKATAN** ini ditindaklanjuti oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I Para Pihak yang menyelenggarakan tugas fungsi sesuai dengan substansi **NOTA KESEPAKATAN**.
- (2) **NOTA KESEPAKATAN** ini dilaksanakan sesuai dengan agenda utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang tertuang dalam **RENCANA AKSI** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAKATAN** ini.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam lampiran yang meliputi:
  - a. Lampiran 1: Rencana Aksi Harmonisasi kebijakan dan peraturan perundangan.
  - b. Lampiran 2: Rencana Aksi Penyelarasan teknis dan prosedur pengukuhan kawasan hutan; dan
  - c. Lampiran 3: Rencana Aksi Resolusi konflik dalam pengukuhan kawasan hutan.

**PASAL 8**  
**JANGKA WAKTU**

**NOTA KESEPAKATAN** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam **NOTA KESEPAKATAN** ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 10**  
**PENUTUP**

- (1) **NOTA KESEPAKATAN** ini berlaku sejak ditandatangani.
- (2) **NOTA KESEPAKATAN** ini dibuat dalam rangkap 14 (empat belas) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

<p><b>PIHAK PERTAMA</b></p> <p><b>KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b> <b>MENTERI DALAM NEGERI</b></p> <p><b>GAMAWAN FAUZI</b></p>	<p><b>PIHAK KEDUA</b></p> <p><b>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI</b> <b>MANUSIA</b> <b>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI</b> <b>MANUSIA</b></p> <p><b>AMIR SYAMSUDIN</b></p>
<p><b>PIHAK KETIGA</b></p> <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN</b> <b>MENTERI KEUANGAN</b></p> <p><b>AGUS D. W. MARTOWARDOJO</b></p>	<p><b>PIHAK KEEMPAT</b></p> <p><b>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER</b> <b>DAYA MINERAL</b> <b>MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA</b> <b>MINERAL</b></p> <p><b>JERO WACIK</b></p>
<p><b>PIHAK KELIMA</b></p> <p><b>KEMENTERIAN PERTANIAN</b> <b>MENTERI PERTANIAN</b></p> <p><b>SUSWONO</b></p>	<p><b>PIHAK KEENAM</b></p> <p><b>KEMENTERIAN KEHUTANAN</b> <b>MENTERI KEHUTANAN</b></p> <p><b>ZULKIFLI HASAN</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>PIHAK KETUJUH</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM MENTERI PEKERJAAN UMUM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DJOKO KIRMANTO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PIHAK KEDELAPAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP MENTERI LINGKUNGAN HIDUP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BALTHASAR KAMBUAYA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>PIHAK KESEMBILAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ARMIDA S. ALISJAHBANA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PIHAK KESEPULUH</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>HENDARMAN SUPANDJI</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>PIHAK KESEBELAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BADAN INFORMASI GEOSPASIAL KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ASEP KARSIDI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PIHAK KEDUABELAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA KOMNAS HAK ASASI MANUSIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OTTO NUR ABDULLAH</b></p>



**MENYAKSIKAN**

**Usulan Opsional :**

1. Presiden
2. Wakil Presiden
3. KPK dengan UKP4
4. ....